



LKIP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara

Telepon (022) 6632308

Laman bappenda.cimahikota.go.id Po-el : bappenda@cimahikota.go.id

Cimahi Jawa Barat - 40514

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah selama satu tahun terakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan aktual serta berorientasi pada hasil. Mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja rencana strategis Tahun 2023-2026 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Laporan kinerja ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja, hasil evaluasi, dan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Cimahi, Januari 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,

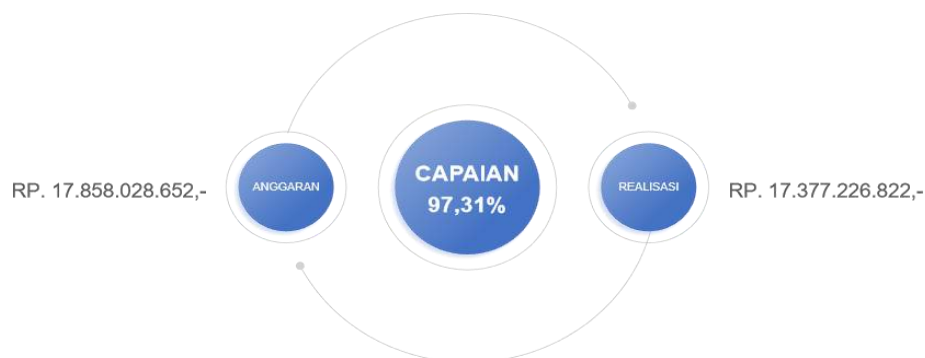


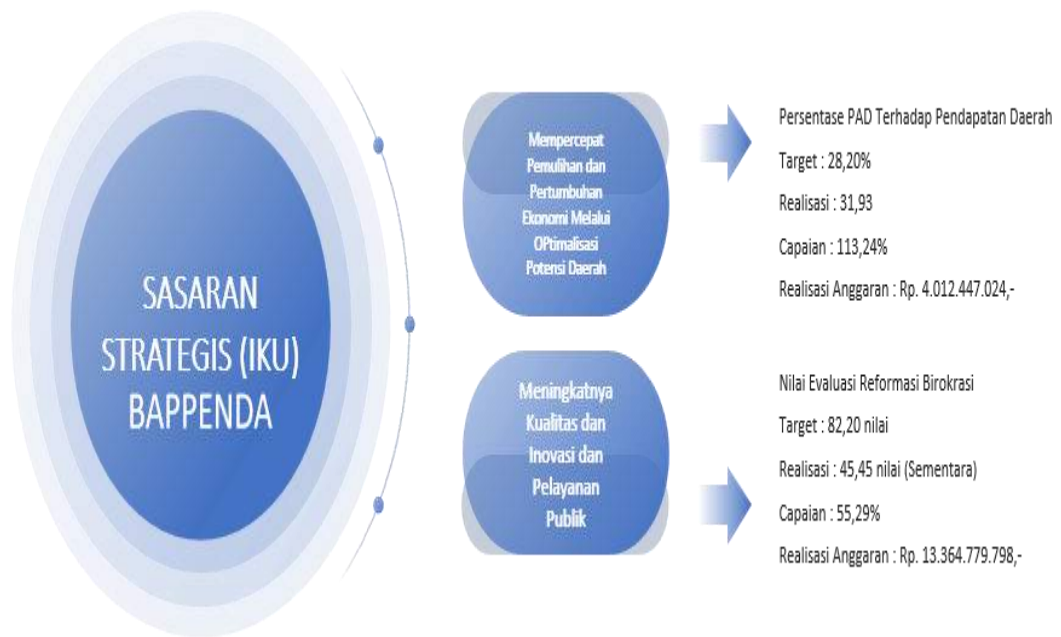
MOCHAMAD RONNY
NIP. 19691015 199003 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bappenda Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda kegiatan Bappenda, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain pencapaian target tahun 2024, laporan kinerja tahun 2024 ini juga menginformasikan pencapaian target renstra tahun 2023-2026 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun kedua.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Gambaran Organisasi	I-6
1.3.1.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	I-6
1.3.2.Sumber Daya Manusia	I-17
1.3.3.Sumber Daya Aset/ Modal	I-20
1.4 Aspek Strategis	I-20
1.5 Isu Strategis	I-21
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja	II-3
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 III-1
3.1. Capaian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	III-1
3.1.1. Capaian Kinerja Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah.....	III-2
3.1.1.1. Perbandingan Target Kinerja dan Realissi Tahun 2024.....	III-2
3.1.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya.....	III-3
3.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target pada Akhir RENSTRA.....	III-4

3.1.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional.....	III-4
3.1.1.5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan.....	III-5
3.1.1.6. Program Yang Mendukung.....	III-9
3.1.1.7. Efisiensi Anggaran.....	III-9
3.1.1.8. Tren Perkembangan Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.....	III-9
3.1.2. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.....	III-11
3.1.2.1. Perbandingan Target Kinerja dan Realissi Tahun 2024.....	III-11
3.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya.....	III-12
3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target pada Akhir RENSTRA.....	III-13
3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional.....	III-13
3.1.2.5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan.....	III-14
3.1.2.6. Program Yang Mendukung.....	III-17
3.1.2.7. Efisiensi Anggaran.....	III-17
3.1.2.8. Tren Perkembangan Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	III-17
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.....	II-3
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Eselon II Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.....	II-4
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Eselon III Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.....	II-5
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Eselon IV/ Jabatan Fungsional Penyetaraan Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.....	II-5
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.....	II-9
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.....	II-10
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Daerah Tahun 2024.....	III-10
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024.....	III-18

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi..... I-7

Bagan 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai dan Jenis Kelamin Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi..... I-18

Bagan 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi..... I-19

Bagan 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Status Golongan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi..... I-19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Instansi pemerintah harus melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan berkelanjutan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan juga sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah daerah Kota Cimahi yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 746, Tambahan Berita Daerah Nomor 226).

1.3. Gambaran Organisasi

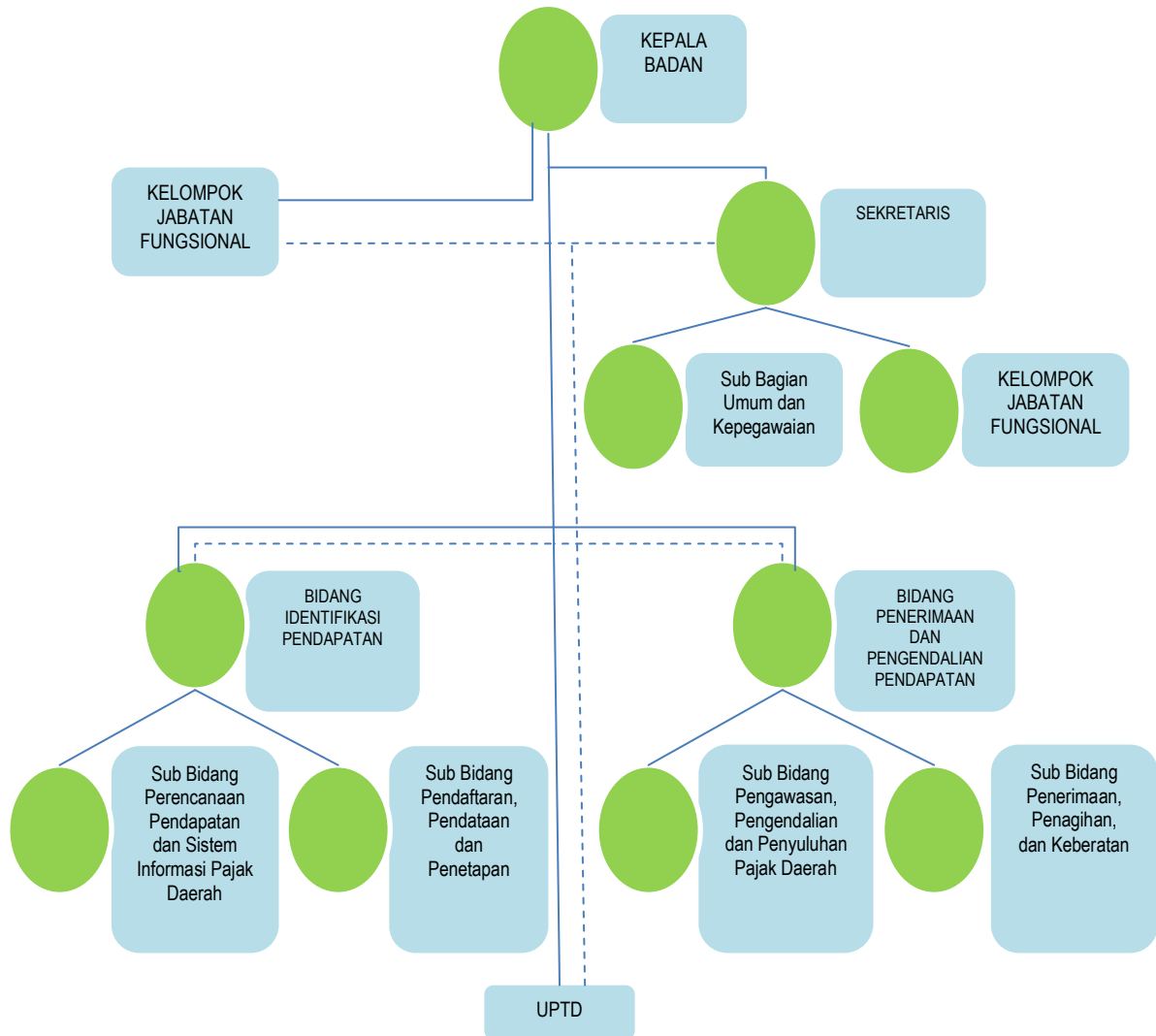
1.3.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, diatur antara lain mengenai Susunan dan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah;

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sebagaimana terlihat di bawah ini :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021, Bappenda Kota Cimahi mempunyai tugas, fungsi dan rincian tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

1. Badan

a. Tugas

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

a. Tugas

Membantu Kepala Badan dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Badan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pelaporan Badan;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Badan;
- 3) Perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan Badan;
- 4) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan;
- 6) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mengoordinasikan rincian tugas :

- 1) Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Badan;
- 2) Mengoordinasikan dan menyusun program dan rencana kerja lingkup Badan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Badan;
- 4) Mengoordinasikan dan menyusun laporan lingkup Badan;
- 5) Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Badan;
- 6) Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan;

- 7) Melaksanakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan;
- 8) Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Badan;
- 9) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan; dan
- 10) Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran seluruh pendapatan daerah.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 4) Mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- 5) Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
- 6) Melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai;
- 7) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- 8) Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 9) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Identifikasi Pendapatan

a. Tugas

Memimpin, merumuskan, membina, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan bidang identifikasi pendapatan.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan;
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan;
- 3) Pengoordinasian urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah Pada Bidang Identifikasi

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Menyusun rencana target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah;
- 3) Melakukan kajian dan analisa potensi pajak daerah baik tarif maupun dasar pengenaan pajak daerah;

- 4) Melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah;
- 5) Menyusun dan mengolah data potensi pajak daerah sebagai bahan dalam menyusun target pendapatan;
- 6) Membangun, mengelola, mengembangkan dan memelihara aplikasi sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi;
- 7) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 10) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

6. Subbidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pada Bidang Identifikasi Pendapatan

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan maklumat wajib pajak;
- 3) Melakukan update dan memperbaiki kesalahan data/pembetulan objek pajak pada saat adanya perubahan data pada sistem informasi pendapatan daerah;
- 4) Melakukan pendataan (ekstensifikasi dan verifikasi objek pajak) serta pengolahan data terhadap objek dan subjek pajak daerah;

- 5) Melaksanakan perhitungan, penetapan, penerbitan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB), surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN) kepada wajib pajak daerah serta penetapan secara jabatan;
- 6) Melaksanakan pendistribusian dan evaluasi surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan (SPPT PBB) perkotaan;
- 7) Melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui;
- 8) Melaksanakan penyimpanan arsip yang berkaitan dengan ketetapan pajak daerah;
- 9) Mendistribusikan dan menerima kembali serta mengadministrasikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak daerah;
- 10) Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD BPHTB);
- 11) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 14) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Tugas

Memimpin, merumuskan, membina, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan.

Fungsi

- 1) Perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan;
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan;
- 3) Pengoordinasian urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

8. Subbidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penyuluhan Pajak Daerah Pada Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
- 3) Melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan pemungutan pajak daerah;

- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan penyuluhan pajak daerah dalam rangka pembinaan kepatuhan wajib pajak;
- 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyiapan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak dan retribusi atas materi penetapan pajak dan retribusi;
- 7) Menyusun naskah dinas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah;
- 8) Melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan dengan sarana pungutan pajak daerah ke dalam kartu persediaan barang cetakan;
- 9) Melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah;
- 10) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

9. Subbidang Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan Pada Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pembukuan pendapatan daerah;
- 3) Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran seluruh pendapatan daerah;

- 4) Menyusun laporan tunggakan Pajak Daerah;
- 5) Menyusun pembukuan dan pelaporan seluruh pendapatan Daerah;
- 6) Melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan pendapatan secara berkala;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan Bank Persepsi berkaitan realisasi pendapatan daerah;
- 8) Melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 9) Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- 10) Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 11) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- 12) Memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- 13) Memproses kompensasi pajak daerah;
- 14) Memproses kedaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- 15) Mengelola piutang dan penghapusan piutang pajak daerah;
- 16) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 18) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pemberdayaan aparatur yang lebih berhasil guna dimasa yang akan datang, di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dituntut melaksanakan kinerja aparatur yang lebih baik. Sosok aparatur yang diharapkan adalah aparatur yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang mantap sesuai dengan tuntutan profesionalisme tugasnya.

Pembinaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dimaksudkan agar semua unsur penunjang pembangunan pemerintahan Kota Cimahi (baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, maupun mekanisme kerjanya) perlu diarahkan pada suatu tujuan yang sama.

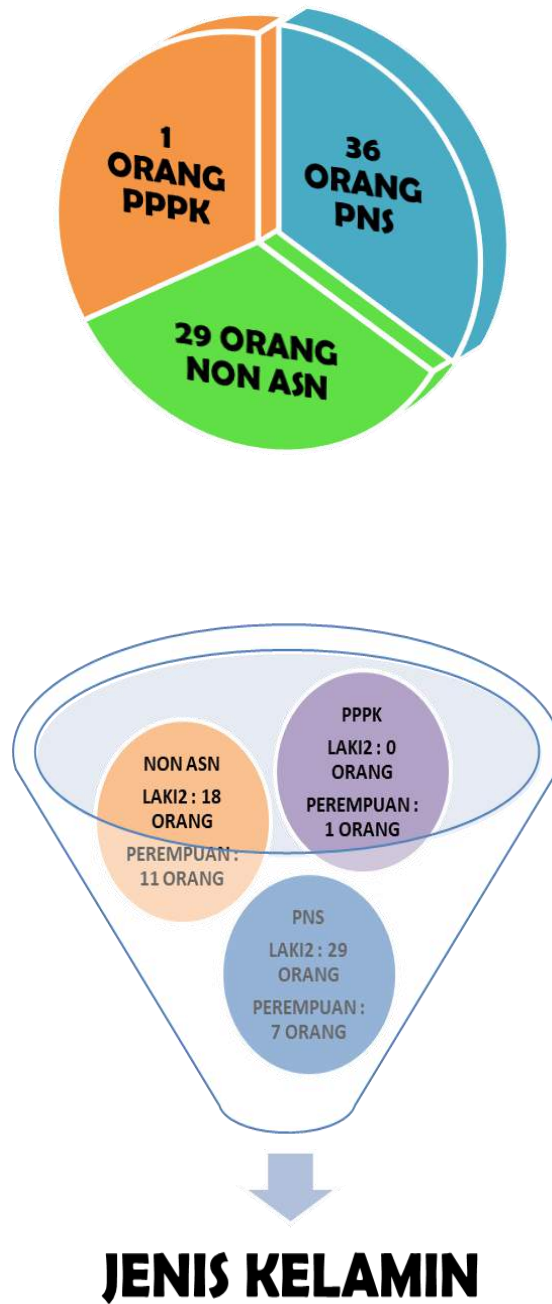
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan prima, maka perlu ditempuh pembinaan dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Maksud hal tersebut adalah agar seluruh aparatur dapat :

1. Memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Mempunyai kemauan dan kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Memiliki kinerja yang tinggi dan kompeten.

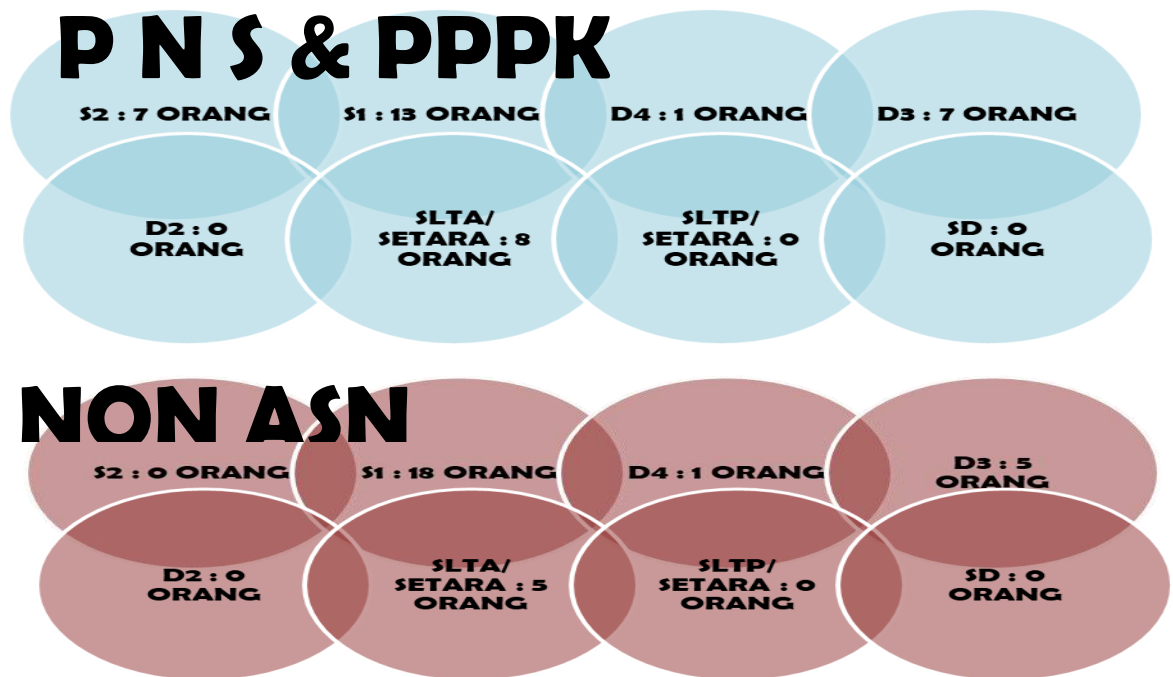
1.3.2. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian yang merupakan gambaran formasi Sumber Daya Manusia di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Posisi Bulan Desember Tahun 2024, sebagai berikut :

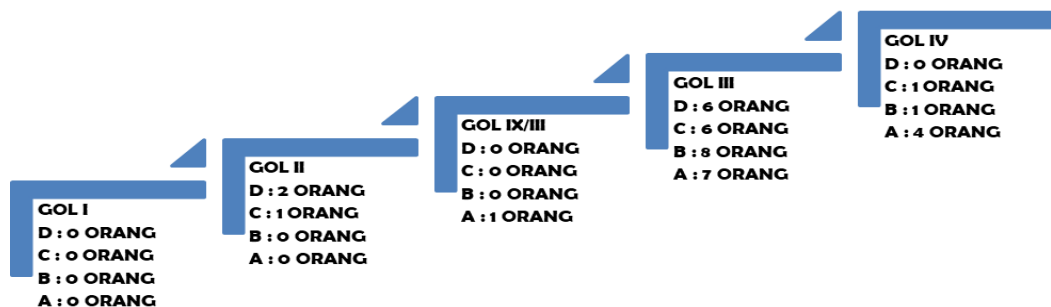
Bagan 1.2
Data Pegawai
Berdasarkan Jumlah Pegawai dan Jenis Kelamin
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Bagan 1.3
Data Pegawai
Berdasarkan Pendidikan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Bagan 1.4
Data Pegawai
Berdasarkan Status Golongan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



1.3.3. Sumber Daya Aset/ Modal

Sumber daya aset/ modal utama di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2024 yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, antara lain :

- a. Bangunan kantor utama beserta kelengkapan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Bapenda sendiri berada di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi lantai 3.
- b. Kendaraan terdiri dari : Operasional Kedinasan Roda 4 sebanyak 1 buah, Operasional Lapangan Roda 2 sebanyak 4 buah dan Operasional/ Mobil Pelayanan Keliling Roda Empat sebanyak 6 buah
- c. Ruang Pelayanan Pajak Daerah untuk memberikan pelayanan pendaftaran maupun pembayaran Pajak Daerah pada masyarakat di ruangan yang terpisah dari bangunan kantor utama Bappenda. Ruang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah terletak di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi lantai 2 Sayap Kanan.

1.4. Aspek Strategis

Penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas fiskal Kota Cimahi;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
4. Pengembangan/Moderinisasi Kesisteman (Digitalisasi);
5. Mewujudkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas operasional kedinasan yang memadai;
7. Menyediakan aparatur yang terampil dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;
8. Melayani masyarakat/wajib pajak dengan optimal.

1.5. Isu Strategis

Permasalahan utama atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi berdasarkan tugas dan fungsinya, antara lain :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional professional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru sita dan lainnya.
2. Data potensi belum akurat.
3. Masih terdapat WP yang tidak patuh membayar pajak.

4. Masih lemahnya koordinasi / sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Belum optimalnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara lebih luas.
6. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi dan arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Penyusunan perencanaan kinerja ini berangkat dari Visi dan Misi Kota Cimahi, yaitu :

VISI : Cimahi Kota Cerdas

MISI :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah
4. Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Fungsi Bappenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah akan bergantung pada kinerja Bappenda dalam pengelolaan

pendapatan daerah. Dimana hal tersebut sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPD 2023-2026 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Dimana strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan tersebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, perlu arah kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan antara lain :

1. Pemeliharaan dan pengembangan/ digitalisasi sistem perpajakan;
2. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai;
3. Cetak massal dan sosialisasi SPPT PBB;
4. Memuktahirkan data-data pajak yang ada;
5. Berkoordinasi dengan PD penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target;
6. Menyiapkan payung hukum dalam pemungutan pajak daerah;
7. Mengurangi penyimpangan pajak daerah;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
9. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Berikut tabel keterkaitan misi dengan tujuan, sasaran, beserta Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, yaitu :

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026. (diolah).

2.2. Perjanjian Kinerja

Tujuan dari perjanjian kinerja merupakan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Dokumen

perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi.

Berikut ini perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 untuk eselon II, III dan IV/Jabatan Fungsional Penyetaraan Birokrasi, dan Anggaran per program yang diselaraskan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 serta dokumen - dokumen lainnya, yaitu :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	28,20%

Sumber : Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon III
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah setiap tahunnya	3%
		Persentase realisasi pajak daerah	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai
		Indeks Profesionalitas ASN	82,50 Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,60 Nilai

Sumber : Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon IV/Jabatan Fungsional Penyetaraan Reformasi Birokrasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah Data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.598 WP
		Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	1 dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	5 laporan
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 unit
		Jumlah laporan hasil pendataan, pendaftaran objek pajak daerah, subjek	4 laporan

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
		pajak, dan wajib pajak daerah	
		Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 laporan
		Jumlah pajak yang disesuaikan NJOP nya	100 OP
		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	118.598 dokumen
		Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	118.598 WP
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.200 dokumen
		Jumlah dokumen hasil penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah	300 dokumen
		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	500 dokumen
		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13 laporan
		Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 laporan
2.	Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15 dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA_SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA_SKPD	1 dokumen

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan
		Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan	12 bulan
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	4 kegiatan
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	68 orang
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	74 orang
		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum	12 bulan
		Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
		Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	2 paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan
		Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang diadakan	12 bulan
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 unit
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan
		Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 bulan
		Jumlah kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69 unit

Sumber : Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024

Tabel 2.5
Program dan Anggaran
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024



Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2024

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	28,20%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	3%	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	dokumen	118.598
				Persentase realisasi pajak daerah	100%	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	2
						SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Dokumen	1
						SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	5
						SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	4

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
						SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Laporan	4
						SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	3
						SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	100
						SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	118.598
						SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	118.598

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
						SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	1.200
						SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	300
						SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	500
						SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	13
						SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Laporan	2

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82,20 Nilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	15
				Indeks Profesionalitas ASN	82,50 Nilai	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,60 Nilai	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4
						SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5
						Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	Bulan	12
						SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	37

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	1
						Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan administasi kepegawaian	kegiatan	4
						SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	68

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
						SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	74
						Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	bulan	12
						SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1
						SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2
						SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3
						SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2
						SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
						SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	12
						SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	80
						Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Julah bulan fasilitas gedung/kantor yang diadakan	bulan	12
						SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	13
						SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1
						Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12
						SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
						SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12
						Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	bulan	12
						SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9
						SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	69

Sumber : Keselarasan Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024 (diolah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran-pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

3.1.1. Capaian Kinerja Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah

3.1.1.1. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024



Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan pendapatan daerah maupun pendapatan asli daerahnya memberikan daya dukung yang baik bagi pertumbuhan ekonomi kota. Adapun capaian persentase PAD terhadap pendapatan daerah di Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan **capaian kinerja 113,24%** dari **target sebesar 28,20%** dan **teralisasi sebesar 31,93%**.

3.1.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya



Dari segi realisasi, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah **meningkat 1,50%** dari tahun sebelumnya yaitu pada **tahun 2023 sebesar 30,43%** dan **tahun 2024 sebesar 31,93%**. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase PAD terhadap pendapatan daerah

meningkat sebesar 8,99% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 104,25% dan pada tahun 2024 sebesar 113,24%.

3.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target pada RENSTRA



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian persentase PAD terhadap pendapatan daerah di Kota Cimahi tahun 2024 sudah melebihi batas aman yaitu sebesar **109,29%** dari **target akhir RENSTRA sebesar 29,72%** dan **terrealisasi 31,93%** pada tahun 2024.

3.1.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional



Analisis tentang perbandingan realisasi dengan data nasional **tidak bisa disajikan** karena indikator kinerja utama mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah **hanya bisa digunakan dilingkungan perangkat daerah Kota Cimahi.**

3.1.1.5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan

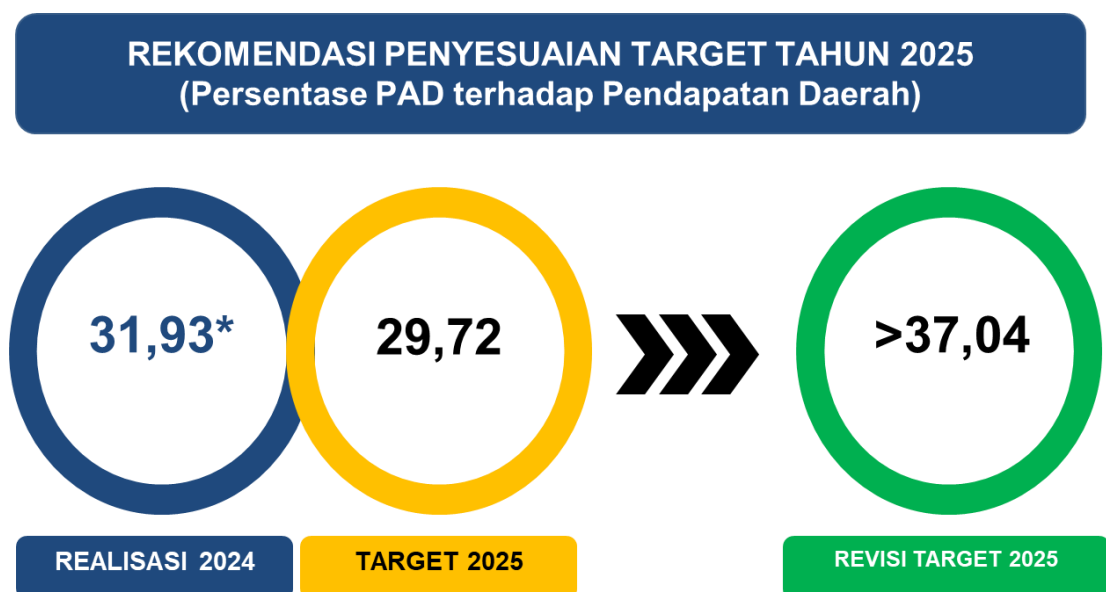


Berdasarkan gambar di atas, meningkatnya pendapatan daerah Kota Cimahi dipengaruhi oleh **peningkatan realisasi dan target pajak daerah.** kondisi penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi sudah meningkat yang diperlihatkan dari capaian kinerja peningkatan target pajak daerah dari tahun sebelumnya sebesar 15,81% dan realisasi capaian pajak daerah

sebesar 112,15%. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh **terkelolanya penerimaan pajak daerah dengan baik** yang ditandai dengan data wajib pajak daerah yang ditetapkan menjadi SKPD sebanyak 118.598 wajib pajak daerah. Baiknya pengelolaan pajak daerah didukung oleh Upaya-upaya seperti Penyusunan dokumen target pendapatan yang terencana sebanyak 2 dokumen, Penyusunan dokumen hukum dan atau kebijakan mengenai perpajakan sebanyak 1 dokumen, Pelatihan dan Peningkatan wawasan bagi wajib pajak mengenai perpajakan sebanyak 5 kegiatan/laporan, Pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen pengelolaan pajak daerah yang efektif sebanyak 4 unit, Penyusunan data objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak yang telah terdaftar sebanyak 4 laporan, Penyusunan data pajak daerah yang valid sebanyak 3 laporan, Penyusunan data objek pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak 100 objek pajak, Penyusunan data wajib pajak yang ditetapkan sebanyak 118.598 dokumen, Pemeriksaan data pajak daerah yang telah diteliti dan diverifikasi sebanyak 118.598 dokumen, Penagihan pajak daerah terhadap wajib pajak sebanyak 1200 dokumen, Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah sebanyak 300 dokumen, Pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh/taat sebanyak 500 dokumen, Penyusunan data penerimaan retribusi daerah hasil rekonsiliasi sebanyak 13 laporan, dan Pengelolaan transaksi pembayaran pajak daerah secara elektronik/digital oleh perangkat daerah penghasil sebanyak 2 laporan.

Untuk mengakselerasi kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 29,72% menjadi lebih besar. Hal ini didorong juga oleh realisasi persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2024 sebesar 31,93% sudah melampaui target persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 2,21%.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah meliputi :



Berdasarkan gambar diatas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah meliputi :

1. Penyusunan dokumen kebijakan retribusi daerah.
2. Melakukan kajian potensi pajak daerah.
3. Melakukan kajian potensi retribusi daerah.
4. Melakukan kajian NJOP PBB.
5. Sosialisasi terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Pengadaan sarana pengelolaan pajak daerah.
7. Penelusuran kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).
8. Apresiasi terhadap wajib pajak daerah yang patuh.
9. Rekonsiliasi data piutang pajak daerah (opsen PKB).

10. Pendataan dan pemuktahiran data subjek dan objek PBB di 15 kelurahan.

11. Pendistribusian surat melalui whatsapp blast.

3.1.1.6. Program yang Mendukung

Meningkatnya pendapatan daerah di Kota Cimahi didukung oleh 1 (satu) program diantaranya yaitu **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.**

3.1.1.7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas **sebesar 4,08%** atau **setara Rp 170.718.302,-**. Adapun efisiensi ini didapat dari anggaran **sebesar Rp. 4.183.165.326,-** dan **terealisasi sebesar Rp. 4.012.447.024,-**.

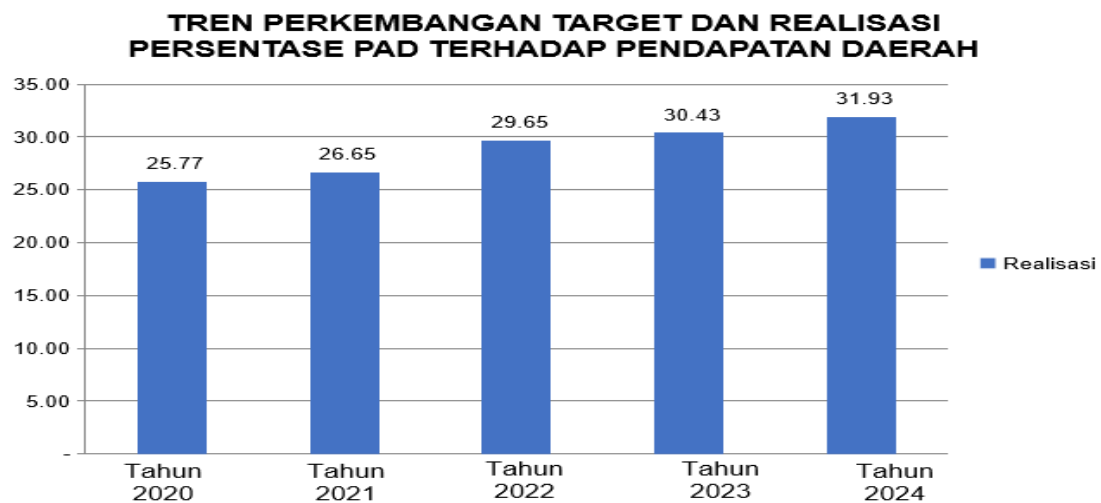
3.1.1.8. Tren Perkembangan Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Berikut ini data target dan realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dan pajak daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, PAD, dan Pajak Daerah
Tahun 2024

Tahun	Target			Realisasi				
	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
2020	1.462.841.536.679,92	331.843.741.663,92	136.545.238.041,00	1.457.996.459.899,91	407.477.197.230,00	193.265.398.170,00	375.687.242.678,91	158.937.237.899,00
2021	1.587.835.737.002,00	1.587.835.737.002,00	1.587.835.737.002,00	1.520.135.560.503,11	1.506.986.132.604,00	1.506.986.132.604,00	1.520.135.560.503,11	1.520.135.560.503,11
2022	1.318.547.247.193,00	1.318.547.247.193,00	1.318.547.247.193,00	1.331.038.275.111,53	1.409.813.359.977,00	1.409.813.359.977,00	1.331.038.275.111,53	1.331.038.275.111,53
2023	1.405.186.978.585,00	1.405.186.978.585,00	1.405.186.978.585,00	1.398.833.022.715,00	1.440.303.293.479,65	1.440.303.293.479,65	1.398.833.022.715,00	1.398.833.022.715,00
2024 (Non Audit BPK)	1.506.986.132.604,00	1.506.986.132.604,00	1.506.986.132.604,00	1.568.100.534.359,00	1.470.793.026.982,29	1.470.793.026.982,29	1.568.100.534.359,00	1.568.100.534.359,00

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi (diolah)



Dilihat dari tren perkembangan realisasinya, persentase PAD terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun dari aspek peningkatan pada tahun 2024, meningkat sebesar 1,50% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 30,43% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 31,93%.

3.1.2. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi Pelayanan Publik

3.1.2.1. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik menunjukkan kondisi yang **menurun**. Kondisi ini mengindikasikan keadaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan memberikan daya dukung yang baik dalam mempertahankan kualitas dan inovasi pelayanan publiknya. Adapun capaian nilai reformasi birokrasi pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan tahun lalu dengan **capaian kinerja 55,29%** dari target **sebesar 82,20 Nilai** dan terealisasi **sebesar 45,45 Nilai** (nilai masih sementara).

3.1.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023



Dari segi realisasi, nilai evaluasi reformasi birokrasi **mengalami penurunan** dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 81,60 Nilai dan tahun 2024 sebesar 45,45 Nilai. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, nilai evaluasi reformasi birokrasi **menurun** sebesar 36,15% Nilai dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 272% dan pada tahun 2024 sebesar -216,71%, hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam penentuan targetnya.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RENSTRA



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian persentase nilai evaluasi reformasi birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah tahun 2024 **sudah dalam batas aman** yaitu **sebesar 151,50%** dari target RENSTRA sebesar 30 Nilai dan terealisasi 45,45 Nilai pada tahun 2024.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional



Analisis tentang perbandingan realisasi dengan data nasional **belum dapat disajikan** karena indikator kinerja utama meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 belum tersedia.

3.1.2.5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kegagalan



Berdasarkan gambar di atas, meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik Badan Pengelola Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh peningkatan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi. kondisi kualitas dan inovasi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah diperlihatkan dari nilai evaluasi reformasi birokrasi mengalami penurunan. Namun kegagalan ini masih bersifat sementara, untuk hal tersebut didorong oleh terlaksananya pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81,95 Nilai, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 90,48 Nilai, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,43 Nilai. Baiknya nilai evaluasi reformasi birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah didukung oleh Upaya-upaya seperti Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan sebanyak 15 dokumen, Pengelolaan administrasi keuangan dengan baik selama 12 bulan, Fasilitasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik selama 12 bulan, Fasilitasi layanan umum kebutuhan perkantoran yang terpenuhi selama 12 bulan, Pengadaan kebutuhan barang milik daerah yang di fasilitasi selama 12 bulan, Layanan jasa surat menyurat yang terkelola dengan baik selama 12 bulan, dan Perawatan dan atau pemeliharaan barang milik daerah yang baik selama 12 bulan.

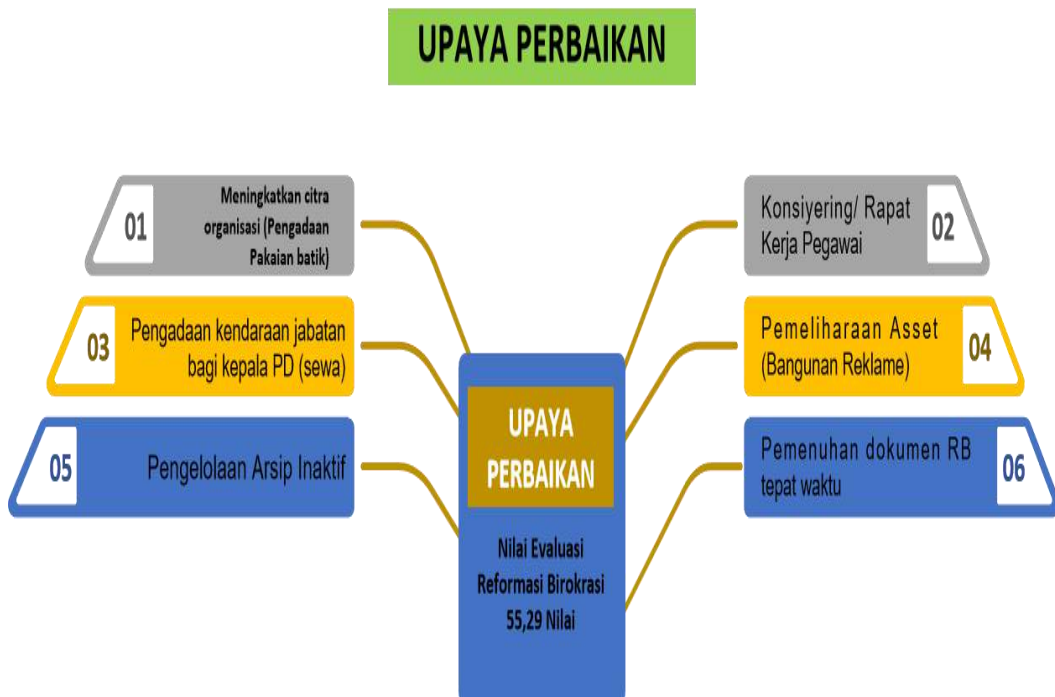
Untuk mengakselerasi kinerja nilai evaluasi reformasi birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 35 Nilai menjadi lebih besar. Hal ini didorong juga oleh realisasi nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 sebesar 81,60 Nilai sudah melampaui target nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025 sebesar 35 Nilai.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025
(Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah)



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja nilai evaluasi reformasi birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah meliputi :



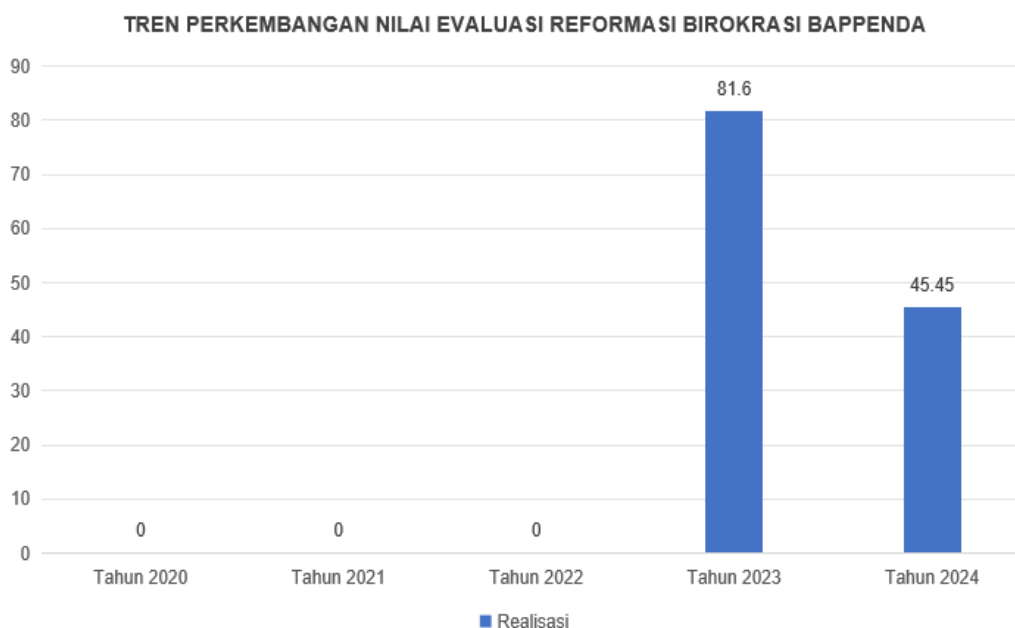
3.1.2.6. Program yang Mendukung

Meningkatnya nilai reformasi birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah didukung oleh 1 program diantaranya yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**

3.1.2.7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas **sebesar 2,27%** atau **setara Rp 310.083.528,-**. Adapun efisiensi ini didapat dari anggaran **sebesar Rp. 13.674.863.326,-** dan **terrealisasi sebesar Rp. 13.364.779.798,-**.

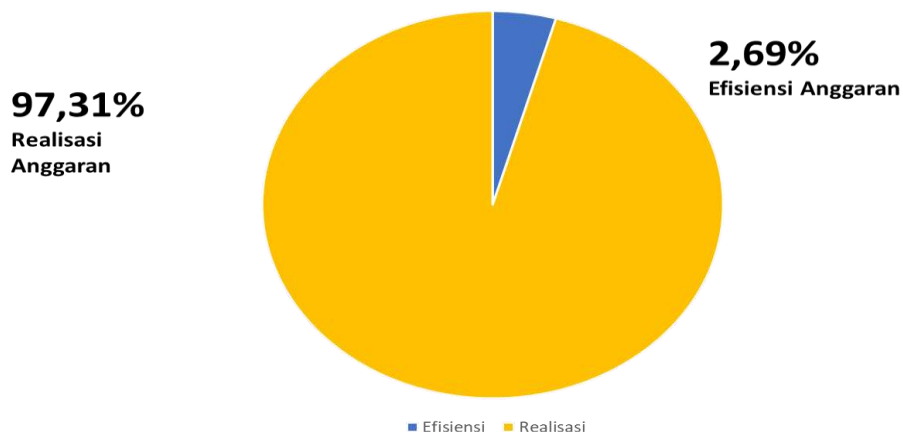
3.1.2.8. Tren Perkembangan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah



Dari sisi tren perkembangan realisasi, nilai evaluasi reformasi birokrasi dari aspek peningkatan pada tahun 2024, nilai evaluasi reformasi birokrasi mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya tidak ada peningkatan dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 81,60 Nilai dan pada tahun 2024 sebesar 45,45 Nilai.

3.2. Realisasi Anggaran

Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah selama tahun 2024 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 17.858.028.652,-. Pada akhir tahun 2024, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 17.377.226.822,- atau sebesar 97,31 %. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik sebesar 97,73%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 1, yaitu Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah sebesar 95,92%



Analisis efisiensi didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing masing sasaran. Dari 2 sasaran, terdapat 2 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 2,69 % atau senilai Rp. 480.801.830,-.

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.674.863.326	13.364.779.798	97,73
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.066.500	112.497.994	98,62
1	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.927.400	50.436.472	99,04
2	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.561.050	2.528.500	98,73

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.259.700	2.256.700	99,87
4	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.589.900	2.561.900	98,92
5	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.288.500	2.283.250	99,77
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.471.950	5.466.700	99,90
7	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.968.000	46.964.472	97,91
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.491.302.526	11.464.807.708	99,77
8	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.446.145.476	11.420.285.236	99,77
9	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.747.050	43.122.972	98,57
10	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.410.000	1.399.500	99,26
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.374.650	355.116.922	94,10
11	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	200.847.650	185.947.400	92,58
12	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176.527.000	169.169.522	95,83
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.994.150	392.011.214	95,15
13	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.529.000	1.518.000	99,28
14	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.466.000	67.327.760	91,64
15	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.061.000	7.411.000	91,94

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
16	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.077.000	83.497.048	99,31
17	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.190.150	50.655.341	87,05
18	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	11.700.000	9.700.000	82,91
19	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.971.000	171.902.065	98,25
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	853.420.000	745.789.200	87,39
20	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	781.545.000	675.789.200	86,47
21	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.875.000	70.000.000	97,39
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.160.000	54.548.594	64,82
22	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.800.000	44.185.325	80,63
23	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.360.000	10.363.269	35,30
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.545.500	240.008.166	70,07
24	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.620.000	170.560.915	73,01
25	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.925.500	69.447.251	63,76
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.183.165.326	4.012.447.024	95,92
VIII	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.183.165.326	4.012.447.024	95,92
26	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	76.610.128	69.627.325	90,89

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
27	Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	126.223.350	119.541.722	94,71
28	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	242.053.700	212.996.472	88,00
29	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.347.179.468	1.315.130.954	97,62
30	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	538.344.084	520.056.121	96,60
31	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	62.881.928	57.199.175	90,96
32	Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	202.229.756	189.378.244	93,65
33	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	589.645.250	580.191.750	98,40
34	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	181.118.062	168.711.940	93,15
35	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	247.506.600	234.396.396	94,70
36	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	98.414.950	94.478.344	96,00
37	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	222.789.750	213.336.472	95,76
38	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	76.916.300	71.670.710	93,18
39	SubKeg Eleketronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	171.252.000	165.731.399	96,78
JUMLAH		17.858.028.652	17.377.226.822	97,31

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024 (diolah).

BAB IV P E N U T U P

Hasil pengukuran capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari target-target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan target pada akhir periode Renstra tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang telah ditetapkan tercapai dengan sangat baik di setiap indikator kinerja. Kedepannya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi akan memperkuat dan mempertajam regulasi agar lebih implementatif, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi stakeholders terkait baik internal maupun eksternal daerah Kota Cimahi sebagai Mitra Strategis dalam mengawal pencapaian kinerja serta membangun Komitmen, Keterlibatan, dan Dukungan Aktif segenap komponen Aparatur Negara, Masyarakat, Dunia Usaha dan *Civil Society*.

Secara internal, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi melakukan penataan dan meningkatkan kompetensi SDM, serta memanfaatkan modernisasi teknologi informasi dan memastikan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mampu mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 dapat dinyatakan "berhasil", karena realisasi 31,93% dari target 28,20% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,50%.

Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 17.858.028.652,-. Pada akhir tahun 2024, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 17.377.226.822,- atau sebesar 97,31 % dengan tingkat efisiensi sebesar 2,69 % atau senilai Rp. 480.801.830,-.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam pencapaian kinerjanya di Tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu alat untuk evaluasi terus menerus, atau menjadi landasan perbaikan implementasi strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di masa mendatang.

Cimahi, Januari 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY
NIP.19691015 199003 1 011

DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	P1			P2				
			Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023	Peningkatan / Penurunan Capaian 2024	Peningkatan / Penurunan Realisasi 2024
					%			%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 1 MEMPERCEPAT PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH										
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Penilaian tingkat desentralisasi fiskal yang dihitung dari realisasi PAD tahun berjalan terhadap realisasi Pendapatan Daerah tahun berjalan : 1. 0,00-10,00 Sangat Kurang 2. 10,01-20,00 Kurang 3. 20,01-30,00 Cukup 4. 30,01-40,00 Sedang 5. 40,01-50,00 Baik 6. >50,00 Sangat Baik	28,20	31,93	113,24	29,19	30,43	104,25	8,99	1,50
SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI PELAYANAN PUBLIK										
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	Nilai Evaluasi Birokrasi adalah Nilai Reformasi Birokrasi yang dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan sebagai berikut: 1. AA (Nilai > 100), Sangat memuaskan; 2. A (Nilai > 80-100), Memuaskan; 3. A- (Nilai > 80-100), Memuaskan dengan Catatan 4. BB (Nilai > 70-80), Sangat Baik 5. B (Nilai > 60-70), Baik 6. CC (Nilai > 50-60), Cukup 7. C (Nilai > 30-50), Kurang 8. D (Nilai 0-30), Sangat Kurang	82,20	45,45	55,29	30,00	81,60	272,00	-216,71	-36,15

P3		P4				P5 A		
Target Akhir RENSTRA (Tahun 2024)	Realisasi 2024 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2024	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Cimaht di Level Nasional	Peringkat Cimaht di Level Pulau Jawa	Target 2025	Perbandingan Realisasi 2024 dengan target 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025
	%							
12	13	14	15	16	17	29	30	31

29,22	109,29	-	-	-	-	29,72	2,21	37,04
-------	--------	---	---	---	---	-------	------	-------

30,00	151,50	59,32	-13,87	-	-	35,00	-20,29	83,40
-------	--------	-------	--------	---	---	-------	--------	-------

PS B		P6								P7
Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi
									%	%
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tercapainya Realisasi Target Pajak Daerah	% Peningkatan Target Pajak Daerah	3	15,81	527	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.183.165.326	4.012.447.024	170.718.302	95,92	4,08
	% Realisasi Pajak Daerah	100	112,15	112,15						
Terlayannya pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00	45,45	55,43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13.674.863.326	13.364.779.798	310.083.528	97,73	2,27
	Indeks Profesionalitas ASN	82,50	90,48	109,67						
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,60	89,43	100,94						
					Efisiensi	17.858.028.652	17.377.226.822	480.801.830	97,31	2,69
					Efisiensi Sasaran					



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mai Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara
Telepon (022) 6652559 Fax. (022) 6632308
Website : bappenda.cimahikota.go.id Email : bappenda@cimahikota.go.id
Cimahi Jawa Barat - 40514

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAH
NOMOR : 500 / 784 / 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);

14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHİ TAHUN 2023-2026
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

200/1784/Sekre

30 Desember 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2023-2026INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2023-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	6
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	Nilai berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat	Bappenda
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah						
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PAD dibagi Pendapatan Daerah dikali 100%	Bappenda

Cimahi, 30 Desember 2022
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,

MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011

KESELARASAN KINERJA (PENETAPAN)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KOTA CIMAHI
TAHUN 2024

WALI KOTA			ESEKON I			ESEKON II				ESEKON IV / JAFUNG PRB							
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,11 - 5,95%	Mempertajam Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	28,20%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Realisasi Target Pajak Daerah	% Peningkatan Target Pajak Daerah	3,00%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Penemuan Pajak Daerah dengan Baik	Jumlah Data Wajib Pajak yang ditetapkan menjadi SKPD	116598 WP	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen legal pendapatan yang beracuna	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen
								% Realisasi Pajak Daerah						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen hukum dan atau kebijakan mengenai perpajakan	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	1 Dokumen
														Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	5 Laporan
														Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sistem pengelolaan pajak daerah yang efektif	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 Unit
														Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya data objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak yang telah terdaftar	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	4 Laporan
														Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya data pajak daerah yang valid	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 Laporan
														Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya data objek pajak yang disesuaikan NUOP nya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NUOP nya	100 Objek Pajak
														Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya data wajib pajak yang ditetapkan	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	116588 Dokumen
														Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya data pajak daerah yang telah diteliti dan diverifikasi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	116585 Dokumen
														Pengalihan Pajak Daerah	Terselenggaranya pengalihan terhadap wajib pajak	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengalihan pajak	1200 Dokumen
														Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	306 Dokumen

WALIKOTA			ESELON II			ESELON III				ESELON IV / JAFUNG PRB									
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja		
														Pengendalian Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Meminimalisir wajib pajak yang tidak sah/taut	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	500 Dokumen		
														Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya data penerimaan retribusi daerah hasil rekonsiliasi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13 Laporan		
														Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana pembayaran pajak daerah secara elektronik/ digital	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 Laporan		
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	80,76 (3) Indeks	Meningkatnya Kualitas & Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Bappenas)	82,75 Nilai	Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75 Nilai	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapatnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terdapatnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen		
								Indeks Profesionalitas ASN	82,50 Nilai					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terdapatnya dokumen RKA-SKPD yang terkoordinasi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
								Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,60 Nilai					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terdapatnya dokumen perubahan RKA-SKPD yang terkoordinasi	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terdapatnya dokumen DPA-SKPD yang terkoordinasi					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terdapatnya dokumen perubahan DPA-SKPD yang terkoordinasi					Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terdapatnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	4 Laporan				
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapatnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan				
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapatnya administrasi keuangan dengan baik					Jumlah bulan fasilitas administrasi keuangan	12 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya gaji dan tunjangan bagi ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan

WALIKOTA			ESELON II			ESELON III				ESELON IV / JAFUNG PRB							
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Target Kinerja	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja
												perangkat daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang terkoordinasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang terkoordinasi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian dengan baik	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	4 Kegiatan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan bagi pegawai	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	68 Orang
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terbilasasinya pegawai yang melaksanakan bimbingan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	74 Orang
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan umum perkantoran	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Terbilasasinya komponen listrik/ peningkatan untuk bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ peningkatan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya kebersihan perkantoran dengan baik	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya kebutuhan logistik perkantoran	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket
														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kebutuhan layanan operasional perkantoran	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket
														Facilitas Kunjungan Tamu	Terselenggaranya tamu yang berkunjung	Jumlah laporan fasilitas kunjungan	12 Laporan
														Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan
										Pengadaan Barang Milik Daerah (Perumdam)	Terselenggaranya barang milik daerah yang disediakan	Jumlah bulan fasilitas gedung/ kantor yang disediakan	12 Bulan	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Terselenggaranya sarana kerja bagi pegawai	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Unit

WALIKOTA			ESELON II			ESELON III				ESELON IV / JAPUNG PRB							
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja
										Urutan Pemerintahan Daerah				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya yang representatif	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit
										Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya surat menyurat melalui jasa layanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi (telepon dan internet) dan listrik tepat waktu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik	Jumlah kendaraan pemrosesan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Berfungsinya sarana dan prasarana peralatan kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69 Unit



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.**

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**

MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	28,20%
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	82,20 Nilai

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.224.863.326,00
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.081.465.521,00
Jumlah Anggaran	Rp 16.306.328.847,00

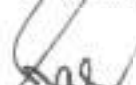
Pj. WALI KOTA CIMAHI,



Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Cimahi, Oktober 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**



MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MOCHAMAD RONNY**

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

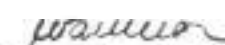
**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**


MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP.

Pembina TK I
NIP. 19670812 199403 2 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai
		Indeks Profesionalitas ASN	82,50 Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,60 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
	Rp.	12.224.863.326,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	114.066.500,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	10.041.273.308,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	377.383.500,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	411.994.150,00
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	853.420.000,00
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	84.180.368,00
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	342.545.500,00

Cimahi, Oktober 2024

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**


MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP.
Pembina TK I
NIP. 19670812 199403 2 009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENERIMAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAISAL, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MOCHAMAD RONNY**

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN,**

FAISAL, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENERIMAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100 %

KEGIATAN

ANGGARAN

	Rp.	4.081.485.521,00
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	4.081.485.521,00

Cimahi, Oktober 2024

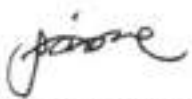
PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN,**


MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011


FAISAL, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI PENDAPATAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVI DIRGANTINI, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MOCHAMAD RONNY**

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH,**

NOVI DIRGANTINI, SH., MM.
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002

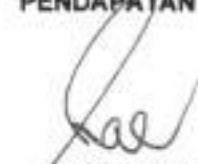
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	3 %

KEGIATAN	ANGGARAN
	Rp. 4.081.485.521,00
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.081.485.521,00

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH,



NOVI DIRGANTINI, SH., MM.
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENETAPAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TUTUS HADIANA, SE., MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOVI DIRGANTINI, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH,**

NOVI DIRGANTINI, SH., MM.
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG
PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN
PENETAPAN,**

TUTUS HADIANA, SE., MM.
Pembina
NIP. 19730425 200604 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENETAPAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.598 wajib pajak
		Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	4 laporan
		Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 laporan
		Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	100 objek pajak
		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	118.598 dokumen
		Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	118.598 dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

		Rp.	1.471.069.080,00
1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp.	538.344.084,00
2.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp.	62.881.928,00
3.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	99.079.756,00
4.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp.	589.645.250,00
5.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp.	181.118.062,00

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH,**

**KEPALA SUB BIDANG
PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN
PENETAPAN,**



NOVI DIRGANTINI, SH., MM.
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002



TUTUS HADIANA, SE., MM.
Pembina
NIP. 19730425 200804 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI
PAJAK DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RADEN DHARMMABUDHI W, S.STP**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi
Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOVI DIRGANTINI, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH,**

NOVI DIRGANTINI, SH., MM.
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN PENDAPATAN DAN
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH,**

RADEN DHARMMABUDHI W, S.STP.
Penata
NIP. 19900225 201206 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI
PAJAK DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.598 wajib pajak
		Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dokumen
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 unit
		Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

		Rp.	1.596.491.441,00
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	76.610.128,00
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	1.348.629.313,00
3.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp.	171.252.000,00

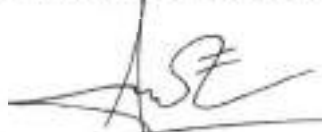
Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH,**

**KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN PENDAPATAN DAN
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH,**

NOVI DIRGANTINI, SH., MM.
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002

RADEN DHARMABUDHI W, S.STP.
Penata
NIP. 19900225 201206 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN, PENAGIHAN, DAN KEBERATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERI SUSANTO, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FAISAL, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN,**

FAISAL, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN,
PENAGIHAN, DAN KEBERATAN,**

HERI SUSANTO, SE.
Penata TK I
NIP. 19800330 200501 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN, PENAGIHAN, DAN KEBERATAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.598 wajib pajak
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1200 dokumen
		Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	300 dokumen
		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13 laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

	Rp.	422.837.850,00
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp.	247.506.600,00
2. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp.	98.414.950,00
3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp.	76.916.300,00

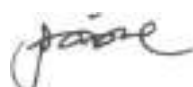
Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN,**

**KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN,
PENAGIHAN, DAN KEBERATAN,**



FAISAL, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006



HERI SUSANTO, SE.
Penata TK I
NIP. 19800330 200501 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REDI RESTIAN, S.IP., MAP**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penyuluhan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FAISAL, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN,**

FAISAL, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH,**

REDI RESTIAN, S.IP., MAP.
Pembina
NIP. 19771214 200501 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.598 wajib pajak
		Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	1 dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	5 laporan
		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	500 dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

	Rp.	591.067.150,00
1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.	126.223.350,00
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.	242.053.950,00
3. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp.	222.789.850,00

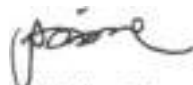
Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN,**

**KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH,**



FAISAL, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006



REDI RESTIAN, S.IP., MAP.
Pembina
NIP. 19771214 200501 1 009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RETNO AYU MARTIATI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

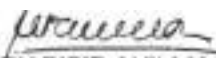
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAH,**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP.
Pembina TK I
NIP. 19670812 199403 2 009

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,**


RETNO AYU MARTIATI, S.Sos.
Penata TK I
NIP. 19770303 200801 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	4 kegiatan
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	68 orang
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	74 orang
		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan
		Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 unit

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69 unit

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

	Rp.	10.155.339.808,00
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp.	200.856.500,00
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	176.527.000,00
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	1.529.000,00
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	73.466.000,00
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	8.061.000,00
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	84.077.000,00
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	58.190.150,00
8. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.	11.700.000,00
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	174.971.000,00
10. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Rp.	781.545.000,00
11. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	71.785.000,00
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	54.820.368,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	29.360.000,00

- | | | | |
|-----|---|-----|----------------|
| 14. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. | 233.620.000,00 |
| 15. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. | 108.925.500,00 |

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**



Dra. UCEU PIPI AVILLIA, MP.
Pembina TK I
NIP. 19670812 199403 2 009

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,**



RETNO AYU MARTIATI, S.Sos.
Penata TK I
NIP. 19770303 200801 2 010



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PERENCANA AHLI MUDA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERI IRAWAN, S.Pd.**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP.
Pembina TK I
NIP. 19670812 199403 2 009

PIHAK PERTAMA,

PERENCANA AHLI MUDA,


HERI IRAWAN, S.Pd.
Penata TK I
NIP. 19690705 199612 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PERENCANA AHLI MUDA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan
		Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan	12 Bulan
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan

SUB KEGIATAN

		ANGGARAN
	Rp.	10.155.339.808,00
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	50.927.400,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	2.561.050,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	2.259.700,00
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	2.589.900,00
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp.	2.288.500,00
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	5.471.950,00
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	47.968.000,00
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	9.996.116.258,00
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	43.747.050,00
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.	1.410.000,00

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP.
Pembina TK I
NIP. 19670812 199403 2 009

PIHAK PERTAMA,

PERENCANA AHLI MUDA,


HERI IRAWAN, S.Pd.
Penata TK I
NIP. 19690705 199612 1 001



PEMERINTAH KOTA CIMAHI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6654274, Faksimile (022) 6654274
Laman : www.cimahikota.go.id Pos-el : setda@cimahikota.go.id

Cimahi, 16 Desember 2024

Nomor : 060/150701/Org
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Nilai Sementara Pengukuran
Indeks RB Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Cimahi
Tahun 2024

Yth. (Daftar terlampir)
di
CIMAHI

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.2114-Org/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Instrumen, Mekanisme dan Tahapan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi awal Tim Evaluasi Internal dan Tim Evaluasi Eksternal Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 telah ditetapkan Nilai Sementara Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran II surat ini.

Nilai sementara ini, masih dapat diperbaiki capaiannya oleh masing-masing perangkat daerah mulai tanggal 16 Desember 2024 s.d 17 Januari 2025 melalui Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi 2.0 (SURABI 2.0) Provinsi Jawa Barat melalui laman: <https://surabi.jabarprov.go.id> dengan menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh tim evaluasi. Hasil perbaikan yang dilakukan oleh perangkat daerah akan dilakukan verifikasi akhir dan ditetapkan menjadi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024.

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Khamsa Hajwarni, S.E. pada nomor telepon 08126906562 atau Sdri. Susi Susanti, S.Sos. pada nomor telepon 082240873884.

Demikian disampaikan, kiranya dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan perhatian seluruh jajaran di masing-masing perangkat daerah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **Pj. SEKRETARIS DAERAH,**
BUDI RAHARJA

Tembusan :
Pj. Wali Kota Cimahi.

**NILAI SEMENTARA PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI HASIL VERIFIKASI	PERINGKAT	KATEGORI
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66,49	1	(50,01-60,00) B = BAIK
2	Kecamatan Cimahi Selatan	66,37	2	(50,01-60,00) B = BAIK
3	Dinas Lingkungan Hidup	64,41	3	(50,01-60,00) B = BAIK
4	Dinas Ansat Daerah	64,07	4	(50,01-60,00) B = BAIK
5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	63,89	5	(50,01-60,00) B = BAIK
6	Kecamatan Cimahi Tengah	63,33	6	(50,01-60,00) B = BAIK
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62,70	7	(50,01-60,00) B = BAIK
8	Dinas Komunikasi dan Informatika,	61,43	8	(50,01-60,00) B = BAIK
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60,97	9	(50,01-60,00) B = BAIK
10	Dinas Kesehatan	60,38	10	(50,01-60,00) B = BAIK
11	Sekretariat Daerah	59,33	11	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
12	RSUD Cibabat	56,81	12	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
13	Dinas Tenaga Kerja	56,78	13	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
14	Bakesbangpol	56,61	14	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	55,6	15	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
16	Dinas Pangan dan Pertanian	54,67	16	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	51,72	17	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
18	Dinas Sosial	50,48	18	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
19	DP3AP2KB	48,91	19	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	45,45	20	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
21	Bappeltbangda	44,76	21	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
22	Kecamatan Cimahi Utara	44,53	22	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43,64	23	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	39,65	24	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
25	Inspektorat	39,33	25	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
26	BPBD	33,23	26	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
27	Sekretariat DPRD	28,63	27	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
28	Dinas Perhubungan	27,19	28	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16,24	29	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK
30	Dinas Pendidikan	5,38	30	(>60) B = DI BAWAH MINIMAL BAIK

KETERANGAN	
80,01-100	SANGAT BAIK
60,01-80,00	BAIK
DIBAWAH 60,00	DIBAWAH MINIMAL BAIK


 PI SEKRETARIS DAERAH,
BUDI RAHARJA

NOMOR :

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi baik Tim Penilai Internal maupun Tim Penilai Eksternal, ditetapkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 sebagai berikut :

**NILAI SEMENTARA PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024**

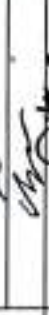
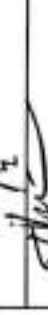
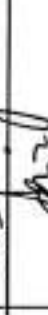
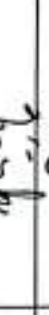
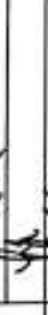
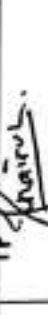
No	Pejabat/Instansi	Indeks IQ	Indeks SPN	Indeks MBSP	Capaian PNT	SLP BPA & APT	LAA	Indeks Demokrasi	Indeks ERM	DI	PK	SPN	SPN-LAND	Capaian Ayo	Timbulkan PMJ	IP ALH	Resolusi RB Gubernur	Capaian Resolusi RB Gubernur	Resolusi RB Gubernur	Resolusi P2020	Profil & Sub	Resolusi & Sub Gubernur
1	BUPISOMD	70,45	92	75,75	100	88,9	70,79	59,9	94,17	0	0	37	80	60,23	0	77,34	0	0	0	0	0	0
2	BAPELITBANGDA	44,76	61,82	86,4	80	88,9	77,77	59,9	33,33	0	0	0	20	63,93	86,48	91,88	0	80	85	47,46	0	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	59,33	41,14	61	80	88,9	76,65	59,9	33,33	0	0	96	96,25	71,78	86,48	82,22	0	60	0	54,59	75	0
4	SEKRETARIAT DPRD	28,43	32,93	75,2	100	88,9	80,65	59,9	0	0	0	47	20	39,7	0	80	0	50	0	0	0	0
5	INSPEKTORAT KOTA	39,33	69,29	83,55	80	88,9	72,5	59,9	66,67	0	0	76	85,83	85,81	0	86	0	70	0	0	0	0
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	43,44	62,75	84,45	80	88,9	73,78	59,9	94,12	0	0	100	80	61,45	86,48	83,28	0	80	0	0	0	0
7	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	45,45	75,14	81,95	100	88,9	78,51	59,9	0	0	0	87	28,75	83,29	86,48	90,47	0	70	0	57,96	0	0

No	Penelitian/Case	Indeks RB	Nilai SPSE	Nilai SAKIP	Capaian PMU	Tingkat PMU	LEA	Indeks Pembangunan	Nilai SKM	DI	POC	RNI	SPM LACOR	Digitalisasi Area	Transaksi PMU	IP Adm	Penyelesaian PMU	Capaian PMU	Penyelesaian PMU	Capaian PMU	Penyelesaian PMU	Proses & Sub	Indeks PMU
8	DINAS PENDIDIKAN	5,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	79,17	55,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DINAS KESEHATAN	60,38	69,25	82	100	88,9	70,89	59,9	97,79	0	0	37	86,67	52,49	86,48	82,67	0	60	100	33	0	80	0
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66,69	81,32	80	100	88,9	64,88	59,9	94,64	0	0	90	86,67	52,26	0	83,93	0	50	100	0	94,65	75	0
11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35,6	52,89	74,41	100	88,9	70,32	59,9	0	0	0	19	59,17	54,1	86,48	83,87	0	70	100	33	0	90	0
12	SATUAN POLISI PANCING PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	16,34	32,21	0	0	88,9	0	59,9	0	0	0	0	0	48,96	86,48	73,54	0	0	0	0	0	0	0
13	DINAS SOSIAL	50,48	41,25	80	100	88,9	64,7	59,9	0	0	0	30	26,67	71,04	0	88,45	0	80	0	80	0	90	0
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48,51	40,34	83,5	95	88,9	74,31	59,9	0	0	0	58	37,08	53,87	0	86,9	0	60	100	51	0	70	0
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	61,72	60,57	73,25	80	88,9	76,48	59,9	89,6	0	0	45	26,67	65,61	0	82,57	0	70	100	0	0	85	0
16	DINAS PERHUBUNGAN	27,19	29,82	75,8	100	0	23,36	59,9	0	0	0	28	88,75	54,08	86,48	80,66	0	0	0	0	0	0	0
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60,57	77,64	79,85	100	88,9	76,42	59,9	0	70	0	20	100	58,36	0	79,93	0	50	100	38	57,38	75	0
18	DINAS TENAGA KERJA	56,78	71,04	78,95	100	88,9	73,62	59,9	96,37	0	0	10	100	52,44	0	81,93	100	50	100	0	0	78,75	0
19	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	54,67	75,57	77,2	80	88,9	68,88	59,9	0	0	0	50	65	58,3	86,48	80,09	0	0	100	0	0	90	0

No	Pemerintah Daerah	Indeks KB	Indeks MPK	Indeks Laju	Capaian MUK	TLUP DPA & Ayo	LRA	Indeks SukSESALAS	Indeks EPA	ZI	PA	PM	Staf- LAQAR	Spesialist Ayo	Transaksi PMJ	U ASB	Resolusi PM General	Capaian Resolusi PM General	Resolusi PM Tindakan	Capaian Resolusi PM Tindakan	Resolusi PM PDR	Praktek PDR	Profil PDR
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARTISIPASI, KEPERMUDAAN DAN OLAH RAGA	63,89	80,03	82,3	80	88,9	69,74	59,9	0	0	0	10	65	41,01	86,48	79,16	100	30	100	50	65,44	90	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	62,7	72,75	79,4	100	88,9	71,34	59,9	0	70	0	20	100	61,95	86,48	89,28	100	0	100	50	0	90	0
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	64,61	59,32	72,55	100	88,9	73,72	59,9	96,29	0	0	48	100	56,74	86,48	86,19	0	60	100	95	0	90	0
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61,43	100	80	100	88,9	76,27	59,9	94,95	0	0	10	100	68,63	0	95,98	0	30	100	65	0	90	0
24	DINAS AKSI DAERAH	64,07	67,29	82,1	100	88,9	72,03	59,9	0	0	0	20	80	85,24	86,48	78,99	0	30	100	50	58,48	90	0
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33,23	41,82	82,3	100	88,9	78,11	59,9	0	0	0	85	68,75	65,07	0	76,28	0	30	0	0	0	0	0
26	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	56,81	56,82	76,9	100	88,9	89,4	59,9	0	0	0	29	42,08	54,53	16,67	79,06	0	30	0	100	43,01	90	0
27	RSUD CIBABAT	76,81	62	73	100	88,9	83,82	59,9	26,82	60	0	30	80	63,47	86,48	80,4	0	30	0	0	4,14	85	0
28	KECAMATAN CIMAH UTARA	44,53	75,5	75,6	100	88,9	78,54	59,9	0	60	0	0	80	26,82	44,69	82,32	0	30	100	50	62,21	0	0
29	KECAMATAN CIMAH TENGAH	83,33	63,44	77,3	100	88,9	80,83	59,9	0	60	0	0	53,33	59,58	0	84,41	0	30	100	100	71,03	90	0
30	KECAMATAN CIMAH SELATAN	66,37	53,25	80,5	100	88,9	75,77	59,9	0	70	0	27	100	60,21	86,48	76,36	0	30	100	85	71,12	90	0
NILAI RATA-RATA CAPAIAN		44,581	56,22	68,60	82,97	77,79	63,94	54,28	28,70	12,19	0,0	34,03	63,62	56,01	39,75	75,19	9,38	41,41	53,13	30,16	21,48	50,43	0,00

TIM EVALUASI
PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2024

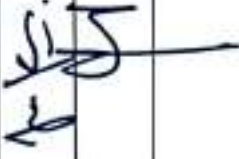
A. TIM EVALUASI INTERNAL

No	Indikator Pengukuran Indeks RB PD	Nama Evaluator	Perangkat Daerah Pengampu	Tanda Tangan
1.	Nilai SPBE	Irwan Nugraha Mansyur, SAP., MM.	Diskominfo Kota Cimahi	
		Azis Sumaryono, S.Kom., M.Kom.		
		Hygsan Iskandar, A.Md.		
		Zaenal Muttaqin Abdussomad		
		Farid Fakhru Roji		
2	Nilai SAKIP	Adhy Rahadhyhan, S. I. Kom.	Inspektorat Kota Cimahi	
		Wahyu Hadi Seputro, S.Kom.		
		Nur Raina Novianti		
		Siti Khodijah Nurjanah		
		Diane Pudjiastuti		
3.	Capaian IKU	Raden Siti Yasyfina Windhiyani, S.T., M.T., M.A.	Bappelitbangda Kota Cimahi	
4.	TLHP BPK dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Wahyu Hadi Seputro, S.Kom.	Inspektorat Kota Cimahi	
		Nur Raina Novianti	BPKAD Kota Cimahi	
		Siti Khodijah Nurjanah		
		Diane Pudjiastuti		
5.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Eby Susanto		
6.	Indeks BerAKHLAK	R. Muhammad Azis Soffary, S.IP.		
		Fitri Kurniawaty, SE., M.M.	BKPSDMD Kota Cimahi	
7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Khairul, S.Kom.	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	
		Egiet Sahara, S.IP.	Inspektorat Kota Cimahi	
8.	Zona Integritas (ZI)	Wahyu Hadi Seputro, S.Kom.		

		Nur Raina Novianti			
		Siti Khodijah Nurjanah			
		Diane Pudjiastuti			
9.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Dini Ayulinda, S.P., M.T.		Bappelitbangda Kota Cimahi	
10.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Dadi Madali, S.H., M.H.		Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	
		Syafarina Idzni Adilla, S.H.			
11.	SP4N LAPOR	Irwana Nugraha Mansyur, SAP., MM.		Diskominfo Kota Cimahi	
		Azis Sumaryono, S.Kom., M.Kom.			
		Hygsan Iskandar, A.Md.			
		Zaenal Muttaqin Abdussomad			
		Farid Fakhrul Roji			
		Adhy Rahadhyan, S. I. Kom.			
12.	Digitalisasi Arsip	Rosi Desrita, A.P., M.Ak.		Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	
		M. Arifin Sunarwan, A.Md.			
13.	Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	HESTRI ROKAYAH, S.Pd., M.Tr.A.P.		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	
		ANGGIA YUNINGTYAS, ST., M.Si.			
14.	IP ASN	R. Muhammad Azis Soffary, S.IP.		BKPSDMD Kota Cimahi	
		Fitri Kurniawaty, SE., M.M.			
15.	Rencana Aksi RB General	Leli Indriati, S.Sos.		Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	
		Susi Susanti, S.Sos.			
		Khamza Hajwarni, S.E.			
16.	Capaian Rencana Aksi RB General	Leli Indriati, S.Sos.		Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	
		Susi Susanti, S.Sos.			
		Khamza Hajwarni, S.E.			
17.	Rencana Aksi RB Tematik	Eka Handayani, ST., M.M.		Disdikoperin Kota Cimahi	
		Yopi Eli Kurnaeli			
		Nurkarti Azni, SKM, MKM.		Dinas Kesehatan Kota Cimahi	
		Umi Yumiati, SKM.			
		Silvia, S.Kom., M.T.		Bappelitbangda Kota Cimahi	
		Mohammad Rizal Mubaroq, S.T., M.E.			

		Vina Septi Suherman, S.P., M.I.L.			<i>[Signature]</i>
		Elivas, S.E.		DPMPTSP Kota Cimahi	
18.	Capaian Rencana Aksi RB Tematik	Eka Handayani, ST., M.M.		Disdagkoperin Kota Cimahi	<i>[Signature]</i>
		Yopi Eli Kurnaeli			
		Nurkarti Azni, SKM, MKM.		Dinas Kesehatan Kota Cimahi	<i>[Signature]</i>
		Umi Yumiati, SKM.			<i>[Signature]</i>
		Silvia, S.Kom., M.T.		Bappelitbangda Kota Cimahi	<i>[Signature]</i>
		Mohammad Rizal Mubaroq, S.T., M.E.			<i>[Signature]</i>
		Vina Septi Suherman, S.P., M.I.L.			<i>[Signature]</i>
		Elivas, S.E.		DPMPTSP Kota Cimahi	
19.	Realisasi P3DN	HESTRI ROKAYAH, S.Pd., M.Tr.A.P.		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	<i>[Signature]</i>
		ANGGIA YUNINGTYAS, ST., M.Si.			<i>[Signature]</i>
20.	Praktik Baik	Leli Indriati, S.Sos.		Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	<i>[Signature]</i>
		Susi Susanti, S.Sos.			<i>[Signature]</i>
		Khamsa Hajwarni, S.E.			<i>[Signature]</i>
21.	Koefisien RB General	Leli Indriati, S.Sos.		Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	<i>[Signature]</i>
		Susi Susanti, S.Sos.			<i>[Signature]</i>
		Khamsa Hajwarni, S.E.			<i>[Signature]</i>

B. TIM EVALUASI EKSTERNAL

No	Indikator Pengukuran Indeks RB PD	Nama Evaluator	Perangkat Daerah Pengampu	Tanda Tangan
1	Validasi Indikator RB General dan RB Tematik	Iwan Kurniawan, S.STP., MAP.	Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat	
2	Validasi Indikator RB General dan RB Tematik	Akhmad Deni Sumirat, S.STP.	Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat	

Mengetahui/Mengesahkan,

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



BUDI RAHARJA

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani.

Dibuat di Cimahi, 3 Desember 2024



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara
Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632308
Laman bappenda.cimahikota.go.id, Pos-el : bappenda@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 800 / 36 / sekre

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang berisi target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas laporan kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun tingkat Kota terkait dengan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
3. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Adapun uraian tugas masing-masing anggota Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**

MOCHAMAD RONNY
NIP. 19691015 199003 1 011

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800 / 36 / sekre

TANGGAL : 2 Januari 2025

**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2024**

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Badan
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Badan
- III. Ketua : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan
- V. Anggota :
1. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Subbid Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan
 3. Kepala Subbid Pengawasan, Pengendalian, dan Pengawasan Pajak Daerah
 4. Kepala Subbid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
 5. Kepala Subbid Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
 6. Fungsional Perencana Ahli Muda
 7. Fungsional Perencana Ahli Pertama
 8. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 9. Analis Rencana Program dan Kegiatan
 10. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
 11. Analis Perencanaan
 12. Analis Pajak Daerah
 13. Analis Pemeriksaan Pajak Daerah

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**



**MOCHAMAD RONNY
NIP. 19691015 199003 1 011**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**
NOMOR : 800 / 36 / sekre
TANGGAL : 2 Januari 2015
**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2024**

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah** : 1. Memberikan pengarah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Memberikan masukan dan memantau secara langsung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- II. Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- III. Ketua** : 1. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- IV. Sekretaris** : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- V. Anggota** : 1. Mengolah, menginventarisasi dan mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**

MOCHAMAD RONNY
NIP. 19691015 199003 1 011